

Pendataan Rakyat Miskin serta Pendampingan dalam Mengambil Bantuan dari Pemerintah

Nauval Agung Fachruzaman¹, Sholehatul Amaliyah², Sinta Dewi³

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia ^{1,2,3}
{nauvalaf04@gmail.com¹, sholehatul07@gmail.com², dewisin077@gmail.com³}

Abstrak. Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Berbagai dampak terjadi akibat adanya pandemi ini, salah satu yang paling terlihat adalah adanya penurunan tingkat ekonomi yang melanda berbagai Negara termasuk Negara Indonesia, akibatnya banyak masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah mencanangkan berbagai program Bantuan Sosial guna membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhannya selama masa pandemic, salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Sosial di Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo RT/RW 008/001 sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat setelah adanya keikutsertaan para peneliti dengan terjun langsung kelapangan. Namun, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pemberian bantuan sosial tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Katakunci: Bantuan sosial, pendampingan, pendataan

Abstract. The Covid-19 pandemic is a problem that is happening all over the world right now. Various impacts have occurred due to this pandemic, one of the most visible is the decline in economic levels that hit various countries including the State of Indonesia, as a result many people find it difficult to meet their daily needs. The government has launched various Social Assistance programs to help the community continue to meet their needs during the pandemic, one of which is the Cash Social Assistance program provided by the Ministry of Social Affairs. The research methodology used is descriptive research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the provision of Social Assistance in Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo RT/RW 008/001 has been effective or in accordance with the effectiveness indicators used, namely the achievement of goals (time and targets), implementation of the integration process, and adaptation in the community after the participation of the community members. researchers by going directly into the field. However, even though they cannot meet their needs for a full month, the provision of Cash Social Assistance does not make people passive or only rely on aid money to meet their daily needs.

Keywords: Social assistance, assistance, data collection.

Latar Belakang

Analisis situasi

Beragama skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori welfare state, merujuk dari “Welfare State”. Encyclopaedia Britannica. Inti dari istilah welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopaedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Di masa pandemi sekarang ini program-program perlindungan sosial berupa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggulangi pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena imbas sosial maupun ekonomi. Program perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk masyarakat sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program akan menemui banyak hambatan. Tidak hanya itu, mengelola dana agar cepat dan tepat mengenai sasaran menjadi persoalan lain yang timbul saat dana tersedia dalam jumlah yang cukup. Tujuan dan manfaat pengabdian.

Tujuan dan manfaat pengabdian.

Tujuan dari pengabdian yang akan dilaksanakan yakni melakukan pendataan dan pendampingan bantuan rakyat miskin dari pemerintah agar pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Program ini dilatar belakangi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, anatra lain, ketidakmapanan sebagai dasar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi, ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat, potenis masyarakat maupun sumber daya alam di lingkungannya belum termanfaatkan dengan secara baik serta penatakelolaan fisik kewilayaan yang belom profesional.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah metode pengabdian, metode kegiatan KKN ini didasarkan pada kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pendataan rakyat miskin serta pendampingan mengambil bantuan dari pemerintah dibagi menjadi 3 tahapan yakni 1) Persiapan kegiatan, 2) Pelaksanaan kegiatan, 3) Evaluasi kegiatan. Gambaran proses dari 3 tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan diskusi atau rapat persiapan dahulu dengan mahasiswa KKN dan tim pengurus bansos serta menentukan jadwal pelaksanaan pendataan dan pendampingan. Setelah rapat persiapan dilakukan selanjutnya mempersiapkan materi.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pendataan dan pendampingan dengan melakukan penyampaian materi, pendataan, dan mengambil dalam mengambil bantuan pemerintah.

Tahap Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan untuk meninterpretasikan hasil dan tulis kesimpulan dari pembuatan laporan hasil pendataan rakyat miskin serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah.

Partisipasi mitra

Mitra dari pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari mahasiswa KKN Universitas Nurul Jadid. Dalam pelaksanaannya diharapkan seluruh mahasiswa KKN Universitas Nurul Jadid memiliki antusias yang tinggi demi berlangsung dan suksesnya pelatihan dan pendampingan pendataan rakyat miskin serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah.

Peran dan tugas masing-masing anggota

Untuk suksesnya pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendataan rakyat miskin serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah dibutuhkan pembagian peran masing-masing anggota pelaksana kegiatan pelatihan dan pendataan rakyat miskin serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah. Adapun pembagian tugas atau peran masing-masing anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Pembagian Tugas

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS
1	ANDI WIJAYA	DPL	Melakukan pendampingan dan memberikan pengarahan terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
2	SINTA DEWI	Mahasiswa	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan

3	SHOLEHATUL AMALIAH	Mahasiswa	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
4	SEPTIA ANIS KHOIRIYAH	Mahasiswa	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
5	NUR MUHAMMAD IAN BIMA SINGGIH	Mahasiswa	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
6	NAUVAL AGUNG FACHRUZAMAN	Mahasiswa	Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
7	MUHAMMAD ISBED	Mahasiswa	Mempersiapkan alat dokumentasi kegiatan
8	MUHAMMAD RIDWAN BASOFI	Mahasiswa	Mempersiapkan alat dokumentasi kegiatan
9	MUHAMMAD SALMAN AL FARISI	Mahasiswa	Mempersiapkan alat dokumentasi kegiatan
10	NASIRUDDIN JAILANI	Mahasiswa	Mempersiapkan alat dokumentasi kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kementerian Sosial (2022), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan Pemerintah, bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam, namun di masa pandemi covid-19, Pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai halnya yang ada di desa Jabung Sisir adanya indikasi ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan; kemudian juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan; dan terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Indonesia pintar. Kemudian mekanisme penyaluran yang dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah. Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidaksinkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) penyaluran terhadap satu orang. Setelah penyaluran tahap 1 (satu) dilakukan, hingga awal Juni 2020, diketahui permasalahan mengenai kerumitan pendataan penyaluran bansos masih menjadi perbincangan publik dan dipertanyakan banyak orang.

Memahami kerumitan penyaluran bansos yang terjadi dan besarnya kesulitan Pemerintah dalam penyaluran bansos selama wabah covid-19, maka perlu dilakukan evaluasi untuk penyelesaian akar permasalahan, yakni terkait pendataan warga penerima bansos. Antara lain tindakan yang perlu dilakukan pemerintah, adalah melakukan sinkronisasi data Pusat dan Daerah melalui E-KTP yang terdapat di catatan sipil, sehingga diketahui keseluruhan data warga dan jumlah penerima bantuan tahap 1 yang telah disalurkan, serta perbaikan data dari kejadian dan laporan yang terkonfirmasi selama penyaluran tahap 1 dilakukan, kemudian Pemerintah Daerah dapat mendata manual melalui Kecamatan dan Desa/Lurah sebagai konfirmasi warga terdampak yang belum masuk dalam warga penerima bansos, sehingga warga terdampak yang sebelumnya tidak terdata dapat diberikan bansos serta meminta warga untuk melapor kepada Lurah/Desa untuk mendaftarkan sebagai penerima bansos akibat wabah covid-19.

Salah satu hal yang harus di perhatikan dalam hal pembagian bantuan sosial dari pemerintah adalah ketepatan sasaran pembagiannya. Keberhasilan atas program tersebut adalah tepatnya pemberian bantuan sosial pada sasaran sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu hal ini sangatlah penting untuk selalu di perhatikan agar program ini bisa langsung terasa dan bisa memberikan dampak positif seperti mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan, kelompok yang terdaftar sebagai fakir miskin hanya sekedar nama saja, karena pengurusan pendataan tersebut lebih banyak diintervensi dan didominasi oleh para pegawai desa. Padahal kelompok fakir miskin yang seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena adanya intervensi yang kurang tepat jadi sasaran yang seharusnya pada fakir miskin yang tepat tidak berjalan dengan seharusnya. Sehingga mengakibatkan tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial pada program ini belum bisa tercapai secara maksimal. Intervensi yang ada pada pemerintahan desa sangatlah besar, tidak hanya pada kelompok penerima akan tetapi sampai juga pada proses penyaluran akan bantuan tersebut pemerintah desa turut mempunyai andil yang cukup besar.

Berdasarkan pada wawancara serta obrolan non formal bersama masyarakat bahwa pemberian dana bantuan sosial belum bisa tepat sasaran dan juga belum bisa merata oleh karena itu efektivitas pada kegiatan ini sangatlah kecil untuk mencapai tujuan yang seutuhnya. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat bahkan akan mengakibatkan pada perpecahan pada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan desa secara struktural di tingkat pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembagian bantuan sosial. Oleh karena itu peran pemerintah desa harus benar-benar terasa keberadaannya bagi masyarakat setempat khususnya bagi para penerima bantuan sosial tersebut.

Usaha pembinaan dari pemerintah desa secara progresif harus dilakukan demi terwujudnya tingkat pemahaman serta pengertian dari masyarakat akan tujuan dari program bantuan sosial dan sasaran serta manfaat yang dicapai dari program tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut sangatlah penting dilakukan agar supaya pengelolaan anggaran yang akan diberikan kepada masyarakat akan bisa digunakan sebagaimana maksud dan tujuan dari program tersebut. Tidak adanya kegiatan pembinaan pada pemberian dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan sebuah kekurangan progresif dan bagian kelalaian yang mengakibatkan munculnya berbagai kendala serta problem baru yang timbul dari

masyarakat sehingga program bantuan sosial sebagai itikad baik pemerintah mendapatkan banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat.

Dengan hadirnya para peneliti dengan terjun langsung kelapangan dalam pendampingan pendataan bantuan sosial di masyarakat Jabung Sisir memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu adanya pemerataan yang lebih baik dibandingkan dengan pembangian bansos yang sebelumnya yang dianggap belum mencapai target yang diharapkan.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yg terjadi pada penyaluran bantuan sosial pada masyarakat baik penyaluran berdasarkan Pemerintah Pusat maupun berdasarkan Pemda di Jabung Sisir. Program bantuan social yg pemerintah lakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, antara lain bantuan pribadi tunai dana desa, bantuan sosial tunai, pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, dan penambahan peserta program keluarga harapan. Berdasarkan output pemetaan terhadap literatur, berita dan fakta terkait perseteruan penyaluran donasi sosial di masa pandemi COVID-19, inti dari semua pertarungan terkait penyaluran donasi sosial tersebut merupakan ketidak andalan basis data penerima donasi sosial.

Di masa pandemi ini, semua donasi sosial wajib disalurkan segera dengan menggunakan data yg ada. Namun, data yg digunakan seringkali tidak seksama sehingga mengakibatkan menimbulkan polemik di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis & kondisi penerima donasi sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus pada petugas kewilayahan dan rakyat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga sangat diperlukan. Transparansi & akuntabilitas pada penyaluran donasi sosial dan kesadaran warga pada memberikan kabar dan pembaruan data mengenai dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yg penting pada suksesnya penyaluran bantuan social di masa pandemic COVID19.

Daftar Pustaka

- Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB. Retrieved June 24, 2020, from BNPB. Dikutip dari <https://bnpb.go.id/berita/presidentetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>.
- Hirawan, F. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic.
- Kemensos. (2011). Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Mufidah, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan.
- Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 13-18.

Situs Web:

- <https://www.csis.or.id/publications/optimizing-the-distribution-of-the-social-assistance-program-during-the-covid-19-pandemic> (diakses 11 September 2021). (n.d.).
- Encyclopaedia Britannica. <http://www.britannica.com/print/topic/639266> (diakses 11 September 2021). (n.d.).
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat> (diakses 12 September 2021). (n.d.).